

Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Analysis of fuel subsidy (diesel) for fishermen in Aceh Besar District, Aceh Province

Zainal A. Muchlisin^{1*}, Nur Fadli¹, Arifsyah M. Nasution², Rika Astuti³, Marzuki³, Darmawi Musni³

¹Jurusan Budidaya Perairan, Koordinator Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111.

²The World Wildlife Fund (WWF), Banda Aceh; ³Jaringan Kualisi Untuk Laut Aceh (Kuala), Banda Aceh. Email korespondensi: muchlisinza@yahoo.com

Abstract. Fuel is one of important components in fishing activity. The objectives of this research were to analyze the need and the receiver of fuel subsidy in Aceh Besar t as well as to analyze the problems that faced by fisherman in Aceh Besar district. The survey was done on June-August 2012 in five sub-district in Aceh Besar namely: (1) Baitussalam, (2) Mesjid Raya, (3) Leupung (4) Lhoknga dan (5) Mesjid Raya. The result shown that the average cost of one trip of fishing activities in Aceh Besar were Rp700.000. The lowest operational cost was found in Seulimum (Rp96.200 per trip) and the highest was found in Baitussalam sub-district (Rp1, 793,710 per trip). Fuel was the biggest cost for fishing activity; it was ranged 40%-73% with average 57.9%. The lowest proportion of fuel consumption was found in Baitussalam sub-district and the highest was found in Lhoknga sub-district. In average, the fisherman's fuel consumption was 1,237L. per month; with total subsidy was Rp 5,824,737 per fisherman per month. The profit will be decreased up to 89.5% if there was no fuel subsidy. In addition, the result also shown that the fisherman in Aceh Besar did not have any skill to generate their alternative income. As the consequence, in the future there is a need to develop programs to generate the alternative livelihood for Aceh Besar fisherman as well as their family.

Keywords: Capture fishery, conservation, budget allocation, and climate changes

Abstrak. Bahan bakar minyak (BBM) salah satu komponen penting dalam suatu operasi penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan penerimaan subsidi solar oleh nelayan di Kabupaten Aceh Besar dan beberapa permasalahan dalam perikanan tangkap. Survey dilakukan pada Juni sampai Agustus 2012. Lokasi survey meliputi lima kecamatan di Aceh Besar, yaitu: (1) Baitussalam, (2) Mesjid Raya, (3) Leupung (4) Lhoknga dan (5) Seulimum. Hasil penelitian menunjukkan biaya operasional per trip rata-rata nelayan di Kabupaten Aceh Besar lebih kurang Rp700.000, dimana biaya operasional terendah didapati pada nelayan di Kecamatan Seulimum (Rp96.200 per trip) dan tertinggi di Kecamatan Baitussalam (Rp1,793,710). Komponen BBM merupakan komponen terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan nelayan Aceh Besar yaitu berkisar 40%-73% (rata-rata adalah 57.9%) dari total biaya operasional. Proporsi pemakaian BBM terendah dijumpai pada nelayan di Kecamatan Baitussalam dan tertinggi pada nelayan Lhoknga. Rerata nelayan di Kabupaten Aceh Besar menghabiskan BBM sebanyak 1,237 liter per bulan, dengan total jumlah subsidi yang diterima adalah Rp 5,824,737 per orang setiap bulan. Jika nelayan tidak mendapatkan subsidi BBM akan dapat menurunkan keuntungan sampai dengan 89.5%. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan Aceh Besar tidak memiliki ketrampilan tambahan selain melaut. oleh sebab itu, dimasa depan program insentif perikanan Aceh Besar untuk sektor perikanan tangkap harus diarahkan untuk peningkatan kapasitas nelayan terutama introduksi dan diversifikasi ketrampilan yang produktif baik untuk nelayan maupun untuk keluarga mereka.

Kata kunci: Perikanan tangkap, konservasi, alokasi anggaran, dan perubahan iklim

Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar terutama di sektor perikanan. Sektor perikanan telah menjadi salah satu sektor andalan Provinsi Aceh, lebih kurang 55% penduduk Aceh bergantung kepada sektor ini baik secara langsung maupun tidak langsung (Yusuf, 2003). Oleh karena itu pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara umum di kawasan ini. Namun sayangnya kondisi perekonomian sebagai besar nelayan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya masih sangat memprihatinkan (Muchlisin *et al.*, 2012). Menurut data BPS, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatra, yaitu mencapai 19.57% (BPS, 2012). The World Bank (2008) melaporkan bahwa dari 975,374 kepala keluarga di Aceh atau setara dengan 4,16 juta jiwa, lebih kurang 510,633 kepala keluarga (52.35) tergolong keluarga miskin.

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir Aceh, kabupaten ini secara administrasi terdiri dari 26 Kecamatan, 8 kecamatan diantaranya adalah kecamatan pesisir. Aceh Besar memiliki potensi garis pantai sepanjang 344 km dengan luas wilayah perairan lautnya adalah 2.796 km² dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 21 Buah serta pulau-pulau kecil terluar 2 buah. Menurut data statistik yang ada pada tahun 2010 tercatat 1,543 orang nelayan tetap dan

513 orang nelayan sambilan (DKP Aceh Besar, 2010). Selain itu, pesisir dan laut Aceh Besar juga memiliki keanekaragaman hayati pesisir antara lain, terumbu karang seluas 1.155 ha dan ekosistem mangrove seluas 980,82 ha (DKP Aceh Besar, 2010).

Bahan bakar minyak (BBM) adalah salah satu komponen penting dalam suatu operasi penangkapan ikan, komponen ini menyumbang 60% dari total biaya operasi (Hermawan, 2006). Subsidi BBM yang dijalankan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban nelayan. Namun kenyataannya saat ini nelayan mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan BBM (solar) dengan harga resmi pemerintah, umumnya mereka mendapatkannya dari pihak ketiga dengan harga jauh lebih tinggi dari harga resmi, kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan mengurangi keuntungan nelayan.

Kebijakan subsidi termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra, ada pihak yang menolak dengan alasan membebani anggaran dan rentan penyalagunaan, namun tidak sedikit pula yang mendukung dengan alasan sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan (Handoko dan Patriadi, 2005). Hal ini senada dengan Martadinigrat (2009) yang menyebutkan bahwa 90% masyarakat nelayan Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan subsidi BBM khususnya bagi nelayan di Aceh Besar dirasa masih diperlukan. Namun, sampai saat ini belum ada analisa kebutuhan bahan bakar minyak bagi nelayan Aceh Besar dan berapa jumlah subsidi yang mereka terima melalui pembelian bahan bakar minyak. Survey ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan penerimaan subsidi solar oleh nelayan di Kabupaten Aceh Besar dan beberapa permasalahan dalam perikanan tangkap.

Bahan dan Metode

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mulai Juni sampai Agustus 2012. Survey lapangan dilaksanakan pada 21-28 Juni 2012. Lokasi survey meliputi lima kecamatan di Aceh Besar, yaitu: (1) Baitussalam, (2) Mesjid Raya, (3) Leupung (4) Lhoknga dan (5) Mesjid Raya (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Besar

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, Badan Pusat Statistik Daerah, dan jurnal-jurnal yang terkait. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara terhadap nelayan lokasi penelitian. Wawancara dengan berpedoman kepada kuisisioner (semi terbuka) dilakukan terhadap 50 orang responden yang berprofesi sebagai nelayan, dengan sebaran sebagai berikut; Kecamatan Baitussalam 11 orang, Kecamatan Leupung 7 orang, Kecamatan Lhoknga 8 orang, Kecamatan Mesjid Raya 14 orang dan Kecamatan Seulimum 10 orang.

Jenis informasi yang dikumpulkan melalui wawancara tersebut antara lain; biaya operasional dan biaya tetap serta pemasukan, trip per bulan, lama waktu operasional, daerah penangkapan dan jumlah konsumsi BBM setiap trip. Biaya operasional dalam penelitian ini adalah biaya BBM ditambah biaya lainnya, yaitu biaya konsumsi dan es, sedangkan biaya perbaikan dan penyusutan kapal dan alat tangkap tidak dimasukkan sebagai komponen biaya operasional disini. Informasi tambahan yang dikumpulkan antara lain; permasalahan dan perikanan tangkap, dan isu-isu konservasi.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah secara manual dan menggunakan komputer dengan program Microsoft Office Excel 2007 dan disajikan dalam bentuk gambar dan tabel, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Rerata besaran biaya operasional per trip nelayan di Kabupaten Aceh Besar lebih kurang Rp700.000, dimana biaya operasional terendah didapati pada nelayan di Kecamatan Seulimum (Rp96.200 per trip) dan tertinggi di Kecamatan Baitussalam (Rp1,793,710). Secara umum besaran biaya per trip nelayan berbeda bergantung kepada jenis dan kondisi kapal, dan alat tangkap yang digunakan (Wikaniati, 2011), jarak tempuh ke lokasi penangkapan (*fishing ground*) dan umur mesin juga memberikan pengaruh kepada konsumsi BBM dan berdampak kepada naiknya biaya operasional.

Komponen bahan bakar minyak (BBM) khususnya solar merupakan komponen biaya terbesar dalam sebuah operasi penangkapan ikan, dan biaya konsumsi menempati urutan kedua. Berdasarkan hasil survey terlihat komponen BBM berkisar 40%-73% dari total biaya operasional. Proporsi pemakaian BBM terendah dijumpai pada nelayan di Kecamatan Baitussalam dan tertinggi pada nelayan Lhoknga. Rerata komponen biaya BBM nelayan Aceh Besar adalah 54.9% (Tabel 1), kondisi ini lebih tinggi berbanding dengan nelayan di Kabupaten Tegal, dimana biaya operasi untuk BBM hanya 47.40% (Hermawan, 2006).

Umumnya nelayan dari Baitussalam melakukan penangkapan ikan di daerah Pulo Aceh, Pulau Breah dan Bate 13 dan umumnya mereka beroperasi selama 3-4 hari per trip dan bermalam di kawasan Pulo Aceh berhampiran dengan daerah penangkapan, dengan demikian mereka dapat menghemat pemakaian BBM, dan konsekuensinya biaya konsumsi meningkat. Sebaliknya nelayan dari Lhoknga umumnya melakukan penangkapan ikan sampai ke Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) namun masih tergolong *one day fishing* hal menyebabkan pemakaian BBM meningkat dan berkontribusi terhadap tingginya proporsi biaya untuk BBM.

Secara umum nelayan Kabupaten Aceh Besar tergolong nelayan kecil (*artisanal fishermen*) menangkap ikan di daerah pesisir dan tergolong *one day fishing*, umumnya nelayan dengan tipe tersebut dijumpai di Kecamatan Leupung, Lhoknga dan Masjid Raya. Nelayan *one day fishing* umumnya mempunyai waktu operasi 10-12 jam, misalnya nelayan yang menangkap ikan di siang hari berangkat melaut pada pagi dan kembali sore hari, sedangkan nelayan yang beroperasi pada malam hari berangkat melaut pada sore hari dan kembali pagi hari esoknya. Suatu temuan menarik diperoleh pada nelayan responden di Kecamatan Seulimum (Lampanah Lengah), mereka memiliki rerata 2 trip penangkapan setiap hari sehingga waktu operasi setiap trip menjadi lebih singkat, yaitu rerata 7.2 jam. Umumnya nelayan di Lampanah Lengah melakukan penangkapan pada siang hari, yaitu mulai pagi hari dan kembali ke pantai pada siang hari, setelah beristirahat makan dan sholat di darat mereka kembali melaut dan kembali ke pantai pada sore hari. Nelayan dengan waktu operasi lebih panjang dijumpai di Kecamatan Baitussalam, rerata nelayan disana memiliki waktu operasi lebih dari 62 jam, dengan total trip per bulan rerata 12 trip.

Tabel 1. Total biaya operasional dan proporsi biaya bahan bakar minyak (BBM) per trip nelayan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan.

No.	Kecamatan	Σ sampel	Total biaya operasi per trip (Rp)	Komponen BBM (Rp)	Persentase komponen biaya BBM (%)
1.	Baitussalam	11	1,793,710	775,400	43.2
2.	Leupung	7	940,475	380,000	40.4
3.	Lhoknga	8	653,625	478,125	73.1
4.	Mesjid Raya	14	154,771	93,750	60.6
5.	Seulimum	10	96,200	55,200	57.4
	Rerata		727,756	344,095	54.9

Secara umum terlihat bahwa kelompok nelayan yang memiliki jumlah trip paling banyak dengan jarak areal penangkapan yang lebih jauh akan menghabiskan jumlah BBM lebih banyak, misalnya nelayan Leupung dan Lhoknga dengan areal penangkapan di sekitar Pulau Rusa dan Batee Dua sampai ke ZEE. Namun demikian, nelayan di Kecamatan Masjid Raya yang memiliki jumlah trip tergolong tinggi namun mengkonsumsi jumlah solar lebih rendah, hal ini disebabkan nelayan disini menangkap tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka, yaitu disekitar Lhok Krueng Raya dan Kampung Baro (Tabel 2).

Hasil survey menunjukkan bahwa penerima subsidi terbesar adalah nelayan di Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoknga. Total pemakaian solar rerata per bulan setiap nelayan di Kecamatan Masjid Raya dan Seulimen tidak jauh berbeda, namun jumlah subsidi yang diterima oleh nelayan di Kecamatan Seulimum jauh lebih rendah, hal ini disebabkan harga jual eceran solar di Seulimum (Lampanah Leungah) lebih tinggi berbanding di Masjid Raya (Krueng Raya) (Tabel 3). Subsidi maksimum hanya dinikmati oleh nelayan di Kecamatan Leupung karena mereka dapat membeli solar pada harga eceran resmi pemerintah (Rp 4,500/L).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nelayan belum menikmati subsidi solar secara maksimal karena mereka harus membeli diatas harga resmi pemerintah, hal ini disebabkan karena belum adanya tempat penjualan resmi (dealer Pertamina)

pada hampir semua kawasan/tempat pendaratan ikan (TPI/PPI). Nelayan harus mengeluarkan uang ekstra berkisar Rp500 sampai Rp1,500 untuk setiap liter solar yang dibeli. Oleh karena itu kedepan pengadaan stasiun pengisian BBM disetiap pusat-pusat nelayan perlu dipertimbangkan. Pohan (2010) melaporkan bahwa pembangunan stasiun pengisian BBM di PPN Pelabuhanratu, Jawa Barat berdampak langsung pada penurunan biaya operasional nelayan dan peningkatan keuntungan. Sebenarnya subsidi yang diterima oleh nelayan bukan hanya dari BBM semata, beberapa komponen lain yang sering disubsidi adalah kapal dan alat tangkap, namun beban subsidi non BBM ini relatif lebih ringan berbanding subsidi BBM (Handoko dan Patriadi, 2005).

Jika kebijakan subsidi BBM dicabut, maka akan berdampak sangat buruk bagi nelayan dimana dapat menurunkan pendapatan rerata 89.5%, bahkan untuk nelayan kecil khususnya akan menyebabkan kerugian karena pendapatan tidak dapat menutupi biaya operasional, sebagaimana ditemukan pada nelayan di Kecamatan Lhoknga, Mesjid Raya dan Seulimum (Tabel 4). Oleh karena itu subsidi BBM untuk nelayan khususnya nelayan kecil mutlak diperlukan. Hal ini senada dengan Zulham (2005) yang menyebutkan bahwa subsidi perikanan tetap diperlukan dalam pengembangan perikanan tangkap di Indonesia. Wikaniati (2011) telah melakukan kajian tentang subsidi solar bagi nelayan ikan teri nasi di Kabupaten Pekalongan, menyimpulkan bahwa pemberian subsidi solar tidak menyebabkan kelestarian sumberdaya ikan teri terganggu, lebih lanjut dijelaskan bahwa subsidi solar berpengaruh nyata dan positif terhadap pendapatan nelayan. Sehingga semakin besar nelayan meningkatkan tingkat pemanfaatan subsidi solar, maka pendapatan akan meningkat.

Rerata nelayan di Kabupaten Aceh Besar menghabiskan BBM sebanyak 1,237 liter per bulan, dengan total jumlah subsidi yang diterima adalah Rp5,824,737 per orang setiap bulan. Menurut data statistik Tahun 2010, tercatat lebih kurang 1,543 orang nelayan tetap di Kabupaten Aceh Besar, dengan demikian dapat diprediksi jumlah BBM yang diperlukan sebanyak lebih kurang 1,908,691 liter per bulan dengan jumlah subsidi lebih kurang Rp8,987,569,191 per bulan. Sebagai gambaran secara nasional nelayan Indonesia telah menerima subsidi BBM sebanyak Rp3.6, Triliun pada tahun 2006 (Ghofar *et al.*, 2008). Secara rerata nelayan Indonesia mengkonsumsi lebih kurang 2.61 milyar liter BMM per tahun atau setara dengan Rp2.2 Triliun (238 juta USD) (Antara News, 2006). Jumlah ini masih tergolong rendah (hanya 0.92%) berbanding jumlah subsidi BBM secara menyeluruh yang mencapai Rp234.2 Triliuin pada tahun 2012 (Anatara News, 2012)., dan secara global jumlah subsidi BBM untuk sektor perikanan mencapai 4.2-8.5 Milyar USD per tahun (Sumaila *et al.*, 2008).

Dari hasil wawancara dengan nelayan Aceh Besar diperoleh informasi bahwa mereka mengaku terjadi penurunan hasil tangkapan saat ini berbanding 5 tahun lalu (Gambar 2), menurut mereka hal ini disebabkan karena perubahan iklim dan kerusakan habitat (Gambar 3). Kendala utama yang dihadapi oleh nelayan Aceh Besar adalah iklim yang tidak menentu (disebabkan oleh perubahan iklim) sehingga mereka sulit memprediksi ruaya ikan dan musim barat yang berlangsung lebih awal dan lebih panjang, kendala lainnya adalah mahal dan kelangkaan BBM solar (Gambar 4).

Tabel 2. Jumlah trip penangkapan dan total pemakaian solar oleh setiap nelayan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan.

No.	Kecamatan	Jumlah Trip/bulan	Waktu/trip (jam)	Harga beli BBM/L (Rp)	Jumlah BBM/ trip (L)	Total BBM/bulan (L)
1.	Baitussalam	11.5	62.67	5,150	150.56	1,080
2.	Leupung	24	11.7	4,500	84.43	2,026
3.	Lhoknga	24	10	5,125	91.88	2,205
4.	Mesjid Raya	24	12	5,000	18.75	450
5.	Seulimum	38.4	7.2	6,000	9.2	422
	Rerata	24.4	20.7	5,155	71.0	1,237

Tabel 3. Penerimaan subsidi rerata per bulan nelayan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan.

No.	Kecamatan	Total pemakaian per bulan (L)	Harga solar non-subsidi (Rp)	Total pembelian per bulan pada harga subsidi (Rp)	Pembelian pada harga non-subsidi (Rp)	Subsidi/Bulan (Rp)
1.	Baitussalam	1,080	9,685	5,562,000	10,459,800	4,897,800
2.	Leupung	2,026	9,685	9,118,285.714	19,624,577.14	10,506,291.43
3.	Lhoknga	2,205	9,685	11,300,625	21,355,425	10,054,800
4.	Mesjid Raya	450	9,685	2,250,000	4,358,250	2,108,250
5.	Seulimum	422	9,685	2,534,400	4,090,944	1,556,544
	Rerata	1,237	9,685	6,153,062	11,977,799	5,824,737

Table 4. Analisis biaya pada harga BBM subsidi dan non-subsidi nelayan di Kabupaten Aceh Besar

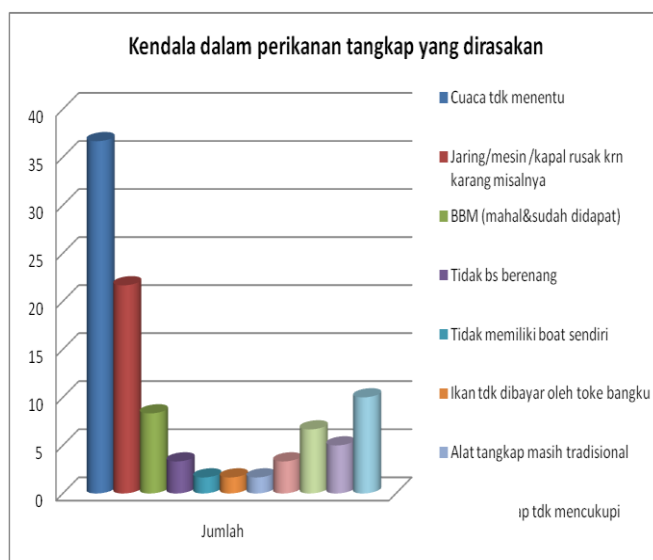
No.	Kecamatan	Biaya Operasional/ trip dengan BBM subsidi (Rp)	Biaya Operasional/ trip dengan BBM non-subsidi (Rp)	Pendapatan rerata/ trip (Rp)	Keuntungan dengan subsidi (Rp)	Keuntungan/kerugian tanpa subsidi (Rp)
1.	Baitussalam	1,793,710	2,538,484	3,350,000	1,556,290	811,516
2.	Leupung	940,475	1,378,180	2,528,000	1,587,525	1,149,820
3.	Lhoknga	653,625	1,065,358	1,050,000	396,375	-15,358
4.	Mesjid Raya	154,771	242,615	201,500	46,729	-41,115
5.	Seulimum	96,200	130,102	130,000	33,800	-102
	Rerata	727,756	1,070,948	1,451,900	3,620,719	380,952



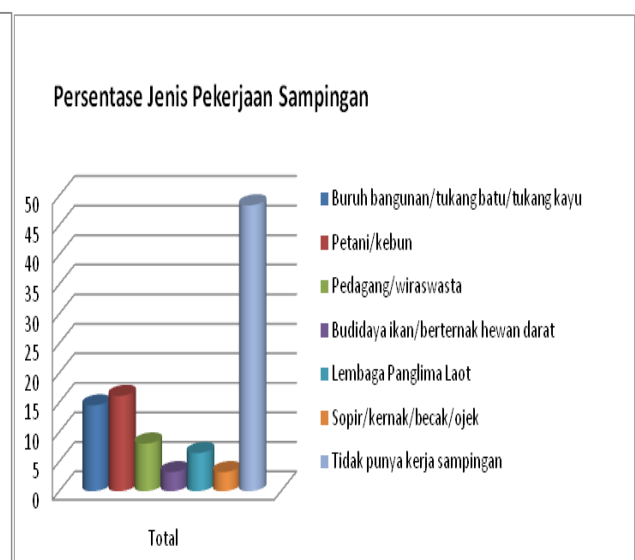
Gambar 2. Persepsi masyarakat nelayan terhadap hasil tangkapan ikan.



Gambar 3. Persepsi masyarakat terhadap penyebab perubahan hasil tangkapan ikan selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 4. Beberapa kendala yang dihadapi oleh nelayan Aceh Besar.



Gambar 5. Jenis pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh nelayan Kabupaten Aceh Besar

Pada musim barat umumnya nelayan tidak melaut mereka menghabiskan waktunya di darat, sebagian memperbaiki jaring atau kapal yang rusak dan sebagian lagi tidak melakukan apapun kegiatan yang produktif, hal ini disebabkan karena sebagian besar (>45%) nelayan Aceh Besar tidak memiliki ketrampilan tambahan selain melaut (Gambar 5). Hal senada juga dijumpai pada nelayan di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya dimana lebih kurang 76% nelayan disana tidak memiliki pekerjaan alternatif, dimana hampir 68% diantaranya menghabiskan waktunya berjam-jam di warung kopi dan hanya 24% saja menggunakan waktu senggangnya untuk kegiatan produktif (Mussawir, 2009).

Dalam masa sulit seperti itu umumnya nelayan mengandalkan pinjaman (berhutang) kepada toke bangku (tengkulak) dengan imbalan hasil tangkapan mereka harus dijual kepada toke bangku berkenaan, kondisi ini menyebabkan mereka selalu terjat dan sulit melepaskan diri dari sistim ijon tersebut. Oleh karena itu dimasa depan program insentif perikanan Aceh Besar untuk sektor perikanan tangkap harus diarahkan untuk peningkatan kapasitas nelayan terutama introduksi dan diversifikasi ketrampilan yang produktif baik untuk nelayan maupun untuk keluarga mereka. Oleh karena itu lebih dari 50% responden menyatakan bahwa usaha perikanan tangkap dimasa depan akan semakin sulit (Gambar 6).



Gambar 6. Persepsi nelayan responden terhadap kondisi perikanan tangkap dimasa depan.

Kesimpulan

Nelayan di Kabupaten Aceh Besar belum menikmati subsidi BBM secara maksimal karena mereka umumnya harus membeli BBM diatas harga resmi pemerintah. Biaya operasional per trip rata-rata nelayan di Kabupaten Aceh Besar lebih kurang Rp700.000, dimana biaya operasional terendah didapati pada nelayan di Kecamatan Seulimum (Rp96.200 per trip) dan tertinggi di Kecamatan Baitussalam (Rp1,793,710). Komponen BBM merupakan komponen terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan nelayan Aceh Besar yaitu berkisar 40%-73% (rata-rata adalah 57.9%) dari total biaya operasional. Proporsi pemakaian BBM terendah dijumpai pada nelayan di Kecamatan Baitussalam dan tertinggi pada nelayan Lhoknga. Rerata nelayan di Kabupaten Aceh Besar menghabiskan BBM sebanyak 1,237 liter per bulan, dengan total jumlah subsidi yang diterima adalah Rp 5,824,737 per orang setiap bulan. Jika subsidi BBM dicabut maka pendapatan nelayan rerata menurut 89.5%. Oleh karena itu, subsidi BBM untuk nelayan perlu dipertahankan dan kedepan pengadaan stasiun pengisian BBM disetiap pusat-pusat nelayan perlu dipertimbangkan. Sebagian besar nelayan Aceh Besar juga tidak memiliki keterampilan tambahan selain melaut. oleh sebab itu, dimasa depan program insentif perikanan Aceh Besar untuk sektor perikanan tangkap harus diarahkan untuk peningkatan kapasitas nelayan terutama introduksi dan diversifikasi ketrampilan yang produktif baik untuk nelayan maupun untuk keluarga mereka.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh The World Wildlife Fund (WWF bekerjasama dengan Jaringan Kualisi untuk Laut Aceh (Kuala) dan Koordinator Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyandang dana dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Antara News. 2006. Government provides subsidized fuel supply for fishermen. Antara News, www.antara.co.id/en/. Tanggal akses 20 Agustus 2006.
- Antara News. 2012. Subsidi BBM membengkak sampai Rp234,2 triliu. <http://www.antaraneews.com/berita/309074/subsidi-bbm-membengkak-sampai-rp2342-triliun>. Tanggal akses 18 Agustus 2012.

- DKP Aceh Besar. 2010. Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, Jantho.
- Ghofar, A., D.K. Schoor, A. Halim. 2008. Selected Indonesian fisheries subsidies: quantitative and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness. *The Nature Conservation – Coral Triangle*, Bali.
- Handoko, R. and P. Patriadi. 2005. Evaluasi subsidi Non BBM. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 9(4): 42-64.
- Badan Pusat Statistik. 2012. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1dandaftar=1danid_subyek=23dannotab=1. Tanggal akses, 18 Agustus 2012.
- Hermawan, M.. 2006. Keberlanjutan perikanan tangkap skala K=kecil : Studi perikanan pantai di Serang dan Tegal. Disertasi, Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Muchlisin, Z.A., M. Nazir dan Musri Musman. 2012. Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan minapolitan di beberapa lokasi dalam Provinsi Aceh: suatu kajian awal. *Depik*, 1(1): 68-77.
- Mussawir. 2009. Analisis masalah kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Thesis Magister, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sumaila, U.R., L. Teh, R. Watson, P. Tyedmers, D. Pauly. 2008. Fuel price increase, subsidies, overcapacity, and resource sustainability. *Journal of Marine Science*, 65: 832–840.
- Wikaniati, 2011. Analisis kebijakan pemberian subsidi perikanan (solar) terhadap kelestarian sumberdaya ikan teri nasi dan pendapatan nelayan payang gemplo (Kasus TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan). Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yusuf, Q. 2003. Empowerment of panglima laot in Aceh. *International workshop on Marine Science and Resource*. Banda Aceh, 11-13 March, 2003.
- Zulham, A. 2005. Implementasi kebijakan subsidi perikanan pada pengembangan perikanan tangkap. Thesis Magister, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.